

## Desentralisasi Fiskal dan Pola Ketergantungan Daerah Kota Batu Jawa Timur

### *Fiscal Decentralization And Regional Dependence Pattern In Batu City, East Java*

Vidya Imanuari Pertiwi <sup>1\*</sup>

E-mail: [vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur

\*corresponding author

Dikirimkan: 23-02-2023; Diterima: 23-05-2023; Diterbitkan: 01-06-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i1.8268>

#### **Abstract**

*Indonesia started implementing fiscal decentralization with the economic reforms of 1998. The expected outcome of its implementation is to stimulate economic development and achieve equitable economic development for all of Indonesia's regions. However, the little local revenue in each region and the strong reliance of the regions on financial affairs to the central government are two barriers to the implementation of autonomy, especially fiscal decentralization. The analysis of fiscal decentralization's implementation in Batu City is covered in this article, along with strategies for boosting municipal revenue. Utilizing secondary data, a qualitative form of data collection is used. According to the study presented in this article, regional own revenue has a key role in determining how financially dependent a region is. Second, although Batu City is one of the cities in East Java with bright potential for economic growth, the level of fiscal dependency in the area is considerable. In order to combat budgetary reliance, efforts might be made to increase advertising levies and tax revenue from the tourism industry.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Autonomy, Batu City, Local Own Revenue*

#### **Abstrak**

*Melalui reformasi ekonomi 1998, desentralisasi fiskal di Indonesia mulai diterapkan. Fungsi yang diharapkan pada pelaksanaan tersebut adalah pencapaian pembangunan ekonomi yang merata untuk seluruh daerah di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satu kendala pada implementasi otonomi terutama desentralisasi fiskal adalah keterbatasan Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing daerah, serta tingginya ketergantungan daerah prihal keuangan kepada Pemerintah Pusat. Artikel ini membahas tentang analisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Batu dan upaya yang bisa digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui secondary data. Hasil penelitian pada artikel ini adalah, pertama Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator penting untuk mengukur ketergantungan fiskal suatu daerah. Kedua, Kota Batu adalah salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki prospek perkembangan ekonomi menjanjikan, namun ketergantungan fiskal daerah masih tinggi. Upaya penanganan ketergantungan fiskal bisa melalui penguatan pajak reklame dan penguatan pendapatan dari pajak di sector pariwisata.*

**Keywords:** *Desentralisasi Fiskal, Otonomi, Kota Batu, Pendapatan Asli Daerah*

---

## 1. Pendahuluan

Pelaksanaan proses desentralisasi diberbagai negara terbagi atas berbagai alasan. Beberapa alasan menginginkan bahwa melalui desentralisasi sektor publik mampu lebih

efisien dan lebih ramping (Martinez-vazquez et al., 2015). Desentralisasi fiskal merujuk pada delegasi kewajiban fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Cahyaningsih & Fitriady, 2019). Dalam pelaksanaannya, desentralisasi memiliki beberapa bahaya. Menurut Prud'homme desentralisasi menyebabkan kurangnya kapasitas karena dilakukan banyak orang sehingga memunculkan ketidakstabilan makro. Pendapat lain terkait bahwa desentralisasi adalah susahnya pelacakan pengalihan dana dalam pengaturan yang terdesentralisasi (Bodman, 2011). Beberapa penelitian sudah membicarakan terkait desentralisasi fiskal dan ukuran pemerintah daerah, namun masih belum mencapai konsensus (Qiao et al., 2018). Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal dikaitkan juga dengan peningkatan output daerah dan tingkat pertumbuhan pengentasan kemiskinan atau sebagai strategi pengurangan kemiskinan diberbagai negara (Agyemang-Duah et al., 2018). Beberapa negara di Uni Eropa misalnya, melaporkan bahwa melalui desentralisasi fiskal berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk mendanai secara keberlanjutan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi (Pasichnyi et al., 2019). Secara umum *Organization For Economic Co-operation and Development* (OECD) juga menaruh perhatian pada pembahasan tentang desentralisasi fiskal, karena mengingat relasinya dengan pembangunan ekonomi yang signifikan (Slavinskaite et al., 2020).

Slavinskaite (2020) berpendapat bahwa terdapat tiga misi utama kenapa menggunakan otonomi daerah yaitu: 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas dari manajemen sumber daya lokal, 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta, 3) memberdayakan dan membentuk ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. saat ini pada era otonomi, beberapa daerah menggantungkan donasi dan juga dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah yang berada di atasnya (Marlissa & Blesia, 2018). Seharusnya pada era otonomi daerah perlu ditekankan untuk meningkatkan kemandiriandaerah dan kesadaran daerah untuk menghasilkan dana, untuk melaksanakan pembangunan daerah (Marlisa & Blesia, 2018). Namun, daerah nyatanya sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Untuk tujuan meningkatkan pendapatan dan kemampuan pemerintah daerah mengurus urusanya sendiri, diperlukan peningkatan kemampuan keuangan (Cahyaningsih & Fitriady, 2019; Marlisa & Blesia, 2018). Keuangan merupakan faktor esensial untuk mewujudkan pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah (Setiawan & Aritenang, 2019). Kemampuan keuangan suatu daerah diindikasikan dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumber daya keuanganya sendiri untuk membiayai kebutuhan daerah, tanpa harus bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat maupun subsidi (Marlisa & Blesia, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat (Marlisa & Blesia, 2018). Pada kasus di Indonesia, melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat beberapa faktor penting yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, yaitu kemampuan keuangan, dimana untuk mengukurnya bisa dilakukan dengan pengukuran kapasitas fiskal daerah dengan rasio pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan (Marlisa & Blesia, 2018). Sedangkan untuk ketergantungan fiskal daerah dapat diidentifikasi melalui pengukuran performa keuangan atau kapasitas serta kesiapan pengembangan otonomi daerah. Dimana hal ini dapat diukur melalui kemampuan keuangan dibiayai oleh pendapatan asli daerah dan transfer pembiayaan. Pengukuran juga bisa dilakukan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio ketergantungan fiskal dilihat dari besarnya pembiayaan dari pusat kepada daerah. Transfer kewenangan pusat kepada daerah menyebabkan konsekuensi untuk menyeimbangkan pembiayaan pusat dan daerah. Daerah secara bebas mampu menggunakan penghasilan untuk membentuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Marlisa & Blesia, 2018).

Penelitian terdahulu pada wilayah Indonesia terkait desentralisasi fiskal, menunjukkan hasil ketergantungan fiskal yang masih sangat tinggi, misalnya pada penelitian (Rahman et al., 2014), dimana melakukan penelitiannya pada Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 1% dan level ketergantungannya mencapai 10% (Marlisa & Blesia, 2018). Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota Batu memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata menarik. Hal tersebut didasarkan pada kondisi alam dan letak geografis yang mendukung (Kodir, 2018). Saat ini Kota Batu mengalami perkembangan keuangan yang pesat, akibat dari perkembangan pariwisata. Kota Batu sendiri, saat ini menjadi destinasi wisata nomor satu di Provinsi Jawa Timur (Zaenurullah & Suryawati, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batu Jawa Timur, terutama pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini didasarkan pada tujuan pelaksanaan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah pada pusat dan perkembangan daerah melalui penguatan ekonomi daerah. Kota Batu dipilih sebagai lokus penelitian, didasarkan pada

beberapa pertimbangan, yaitu: 1) Kota Batu tergolong daerah yang baru memiliki otonominya sendiri. Sebelumnya Kota Batu menjadi bagian dari Kabupaten Malang (Tri Hardianto et al., 2017). 2) Kota Batu saat ini menjadi destinasi wisata utama di Provinsi Jawa Timur, sehingga segala pendukung pariwisata misalnya hotel sedang berkembang pesat (Kodir, 2018; Zaenurullah & Suryawati, 2015).

## **2. Metode**

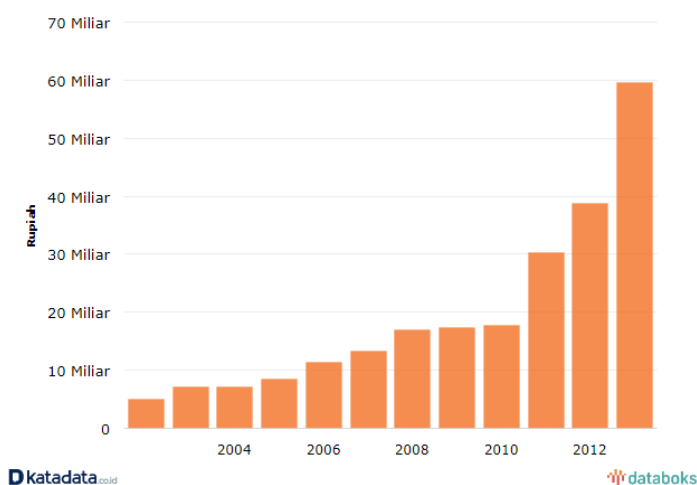
Penelitian ini memiliki dua fokus utama yaitu tentang pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan desentralisasi fiskal dan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Lokasi utama yang dijadikan sebagai subyek utama penelitian adalah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi antara lain: 1) Kota Batu menjadi salah satu daerah otonom termuda di Jawa Timur, 2) Kota Batu menunjukkan perkembangan daerah yang sangat pesat apabila dibandingkan dengan daerah lain, terutama di Bidang Pariwisata, 3) Kota Batu sebagai salah satu daerah destinasi utama wisata di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan secondary data analysis. Analisis data sekunder atau secondary data analysis mengacu pada analisis data yang dilakukan melalui data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain (Donnellan & Lucas, 2015). Data Sekunder yang dimaksud pada penelitian ini merujuk pada data yang sudah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Batu, Peraturan Walikota Batu tentang Rancangan Anggaran Kota Batu dan RPJMD Kota Batu (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penelitian ini juga melibatkan beberapa liputan dari media masa, artikel jurnal yang relevan serta sumber-sumber lain yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Desentralisasi Fikal Kota Batu**

Otonomi daerah mulai massif dilaksanakan pada era reformasi 1999. Namun terkait dengan desentralisasi fiskal mulai dikenal ketika kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disahkan (Zaenurullah & Suryawati, 2015). Penerapan desentralisasi juga dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan perekonomian daerah (*development for economic growth function*) (Cheema & Rondinelli, 1983). Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, daerah-daerah di Indonesia

terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi pemekaran yang menghasilkan 2-5 Daerah Otonom Baru (Zaenurullah & Suryawati, 2015). Pada tahun 2012, Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa pemekaran wilayah yang sudah berhasil dilakukan masih belum bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat (Zaenurullah & Suryawati, 2015). Penyebab kegagalan pemekaran daerah adalah tuntutan percepatan pembangunan ekonomi Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih belum bisa dicapai. Saat ini Kota Batu mengalami perkembangan keuangan yang pesat. Hal ini terbukti dengan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Berikut dibawah ini adalah bagan terkait tren pertumbuhan pendapatan daerah Kota Batu dari tahun 2002-2012:



**Gambar 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu Jawa Timur 2002-2013**

(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>, 2016)

Pendapatan asli daerah pada sektor pajak di Kota Batu, didominasi oleh pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian diikuti oleh pajak hotel, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan selanjutnya adalah pajak hiburan. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah di Kota Batu pada tahun 2017:

Jenis Pajak	Realisasi
1 Pajak Hotel	19 772 086 136
2 Pajak Restoran	11 278 263 625
3 Pajak Hiburan	14 826 307 547
4 Pajak Reklame	1 409 267 374
5 Pajak Penerangan Jalan	12 530 082 315
6 Pajak Parkir	1 583 919 671
7 Pajak Air Tanah	1 976 051 667
8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19 085 785 206
9 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	31 390 103 885
<b>Ju</b>	<b>113 851 867 430</b>

**Gambar 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah di Kota Batu (rupiah) 2017**

Sumber: (<https://batukota.bps.go.id/>, 2019)

Oktober tahun 2017 pendapatan sektor pajak Kota Batu mencapai Rp 107,4 miliar atau 96,7 persen dari target yang dibebankan, yaitu Rp 111 miliar (<https://radarmalang.jawapos.com/>, 2022). Namun pada pendapatan daerah hasil dari retribusi diketahui telah menurun. Pemasukan dari sektor retribusi daerah pada oktober tahun 2017 baru bisa mengumpulkan 31 persen dari target. Yaitu Rp 3,59 miliar dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 11,3 miliar. Padahal, selama ini potensi pendapatan dari retribusi selalu digadang-gadang akan menambah PAD dari tahun ke tahun seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu (<https://radarmalang.id/>, 2018). Menurut Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, saat ini sektor pajak mencapai angka 96%, dan masih akan bertambah kembali. Hal ini dipicu dengan pajak hotel yang sudah mencapai 110%. Sedangkan pajak restoran mencapai 107%. Sementara untuk pajak hiburan lebih menggembirakan lagi, karena sudah mencapai 138%. Sementara beberapa yang masih di bawah target adalah pajak reklame yang baru 81 persen dan pajak penerangan jalan 84%.

### 3.2. Pengukuran Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Batu

Pengukuran terkait kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dengan jumlah alokasi anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Batu. Berikut adalah gambar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:

**Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:**

1. Pendapatan Daerah	Rp	857.679.313.304,58
2. Belanja Daerah	Rp	878.928.063.304,58
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>21.248.750.000,00</b>
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	24.248.750.000,00
b. Pengeluaran	Rp	3.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>21.248.750.000,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	0,00
Anggaran Tahun		
berkenaan:		

**Gambar 3.** Anggaran Pendapatan Kota Batu Tahun 2016

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

Apabila melihat kesehatan fiskal daerah dengan perbandingan jumlah pendapatan daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah pemerintah Kota Batu mengalaih defisit sekitar 2% dari total APBD 2016. Selanjutnya, dapat dilihat gambar dibawah ini untuk jumlah pendapatan daerah Kota Batu 2016:

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	118.739.324.302,58
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp	669.084.205.880,00
c.	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp	69.855.783.122,00

**Gambar 4. Total Pendapatan Daerah Kota Batu 2016**

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp	94.100.000.000,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp	8.060.904.391,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	2.301.429.333,26
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	Rp	14.276.990.578,32

**Gambar 5. Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2016**

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

a.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	57.368.870.000,00
b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	480.460.016.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	131.255.319.880,00

**Gambar 6. Rincian Dana Perimbangan Kota Batu 2016**

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

a.	Hibah sejumlah	Rp	0,00
b.	Dana Darurat sejumlah	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp	53.245.676.122,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	14.572.714.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp	2.037.393.000,00
f.	Dana Insentif Daerah	Rp	0,00

**Gambar 7. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batu 2016**

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah PAD dari Kota Batu apabila dibandingkan dengan jumlah pendapatan dari pusat masih jauh timpang. Dana perimbangan dari pusat masih 5x lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah Kota Batu itu sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kota Batu dari transfer pusat masih tinggi. Selanjutnya, untuk melihat kesehatan fiskal dari pemerintah daerah Kota

Batu dapat dilihat melalui analisis gambar dibawah ini:

a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	439.601.391.806,30
b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp	439.326.671.498,28
a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	40.171.174.500,00
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	195.636.272.390,20
c.	Belanja Modal sejumlah	Rp	203.519.224.608,16

Belanja TidakLangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	311.666.706.507,00
b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp	0,00
c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp	0,00
d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp	65.537.864.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	11.683.120.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp	8.156.890.439,10
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah	Rp	41.556.810.860,20
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	1.000.000.000,00

**Gambar 8. Rincian Belanja Daerah Kota Batu**

(Sumber: Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 2016)

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa perbandingan belanja langsung dan tidak langsungnya seimbang. Namun, jumlah belanja pegawai masih tinggi sehingga untuk kesehatan fiskalnya masih dikatakan belum sehat. Ditambah dengan jumlah defisit dari APBD mencapai sekitar 1.5%. Secara umum kemandirian keuangan daerah diukur dengan indikator pembagian antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan keseluruhan pendapatan daerah (Atiko et al., 2016; Vidya Imanuari Pertiwi & Oktarizka Reviandani, 2022). Pengukuran indikator kemandirian daerah pada kamus Kementerian Keuangan disebut sebagai Metode Share, metode ini apabila secara rumus matematis dihidung dengan perbandingan atau rasio sebagai berikut (Haryanto, 2018):

$$\text{Share} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$



Berdasarkan pemamparan diatas dari kasus maupun tinjauan literatur hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya ialah melalui penguatan desentralisasi fiskal yang membawa daerah mandiri untuk menggali potensi keuangan dan mengalokasi keuangan tersebut untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal diberbagai daerah di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah terkait ketidakmampuan daerah untuk meningkatkan dan menggali potensi keuangan daerah sehingga menggantungkan hidupnya pada pemerintah pusat. Serta, ketidakmampuan daerah untuk mengontrol belanja daerah kepada belanja pegawai dan melupakan belanja modal yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. sehingga dengan berdasar pada tinjauan teoritis dan kasus pada daerah Kota Batu, yang telah berhasil meningkatkan PADnya secara terus menerus, daerah diharapkan melakukan optimalisasi pendapat sesuai dengan karakteristik daerahnya, misal Kota Batu dengan pariwistanya. Selanjutnya, pemerintah daerah bisa dengan membangun kerjasama dengan pihak swasta dan membuka peluang investasi. Kota Batu juga tersohor atas pajak reklamenya dan hal ini layak dicontoh oleh daerah lain yang memiliki keinginan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan PADnya.

Bird dan Vaillancourt (2000) dalam (Ladjin, 2008), terdapat dua syarat penting suksesi pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu 1) proses pengambilan keputusan daerah yang demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya kebijakan yang transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat, 2) rancangan pembiayaan kebijakan, sepenuhnya harus ditanggung masyarakat lokal atau dana lokal sehingga tidak diperlukan “ekspor pajak” atau transfer dari pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut kemampuan daerah atau pemerintah lokal melakukan pungutan pajak (*taxing power*) adalah sebuah keharusan (Bahl, 2013). harapan dari pajak yang berhasil dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah adalah pembangunan berbagai infrastruktur dan membiayai segala jenis berbagai pengeluaran public (Ladjin, 2008).

#### **4. Simpulan**

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi yang disusun sebagai jalan untuk peningkatan kemandirian daerah dan keterjangkauan yang semakin dekat dengan potensi asli daerah terbengkalai, akibat ketidakmampuan *street level bureaucracy* mencapai otonomi dengan benar. Beberapa data pada bagian hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia, terutama di Kota Batu Jawa Timur, masih bermasalah untuk Pendapatan Asli Daerah. Kota Batu masih belum bisa melepas ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini terbukti dari presentase hibah dari pemerintah pusat dan PAD Kota

Batu. Selanjutnya permasalahan lain adalah, terkait dengan pengelolaan anggaran yang masih terpusat dengan pengeluaran belanja untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daripada untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi Kesehatan fiskal Kota Batu masih belum kearah positif, mengingat indikator positif apabila belanja modal memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Kota Batu di Jawa Timur, saat ini menjadi salah satu kota rujukan destinasi wisata utama bagi masyarakat Jawa Timur, terutama area Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, dan Malang. Kota Batu memiliki keuntungan secara administratif wilayah karena berdekatan dengan wilayah pegunungan, dimana setidaknya ada sekitar 3 gunung di sekitar wilayah Kota Batu yang menyebabkan iklim di Kota Batu cenderung dingin. Sehingga hal ini mendukung pengembangan destinasi wisata dibidang pertanian. Kota Batu sendiri miliki beragam wisata alam, mulai dari wisata dengan basis eco green park sampai dengan wahana permainan anak dan museum. Kondisi ini seharusnya bisa menjawab permasalahan yang kedua yaitu terkait bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu perlu melakukan optimalisasi penerimaan pajak yang di dapat dari hasil pengelolaan sector pariwisata. Badan Usaha Milik Daerah juga perlu diberdayakan dengan Menyusun usaha daerah berbasis wisata yang menitikberatkan peran komunitas masyarakat untuk meningkatkan kemampuan daerah meningkatkan PAD serta mendorong keberdayaan dari masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyadari bahwa pada penulisan penelitian ini memiliki beberapa limitasi penelitian. Pertama, data yang dijadikan sebagai alat analisis masih data di tahun 2016 (bukan data terbaru), hal ini disebabkan karena sulitnya melakukan akses data rincian keuangan daerah. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan data terbaru untuk melakukan analisis Kesehatan fiskal Kota Batu untuk mencapai hasil yang relevan. Limitasi yang kedua adalah, pada saran untuk peningkatan PAD, diperlukan studi komparasi untuk bisa mendapatkan *best practice* otonomi daerah dari daerah lain. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan melakukan studi komparasi untuk membandingkan penerapan otonomi daerah terutama desentralisasi fiskal Kota Batu dengan daerah lain, sehingga bisa mendapatkan gambaran celah kekurangan dan kelebihan untuk melengkapi saran perbaikan dari optimalisasi PAD Kota Batu.

## 5. Referensi

Agyemang-Duah, W., Kafui Gbedoho, E., Peprah, P., Arthur, F., Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035>

- Atiko, G., Hasanah Sudrajat, R., & Nasionalita, K. (2016). ANALISIS STRATEGI PROMOSI PARIWISATA MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH KEMENTERIAN PARIWISATA RI (studi deskriptif pada akun Instagram @indtravel). *Jurnal Sositoteknologi*, 15(3), 378–389. <https://doi.org/10.5614/sostek.2016.15.3.6>
- Bahl, R. (2013). Implementation Rules For Fiscal Decentralization. *Annals of Economics and Finance*, 14(January), 851–884. <http://ideas.repec.org/a/cuf/journal/y2013v14i3bahl.html>
- Bodman, P. (2011). Fiscal decentralization and economic growth in the OECD. *Applied Economics*, 43(23), 3021–3035. <https://doi.org/10.1080/00036840903427208>
- Cahyaningsih, A., & Fitrady, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 48–63. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*.
- Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2015). *Oxford Handbooks Online Secondary Data Analysis*. 2(January), 1–15. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934898.013.0028>
- Haryanto, J. T. (2018). Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 312–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.88>
- <https://databoks.katadata.co.id/>. (2016). *Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu, Jawa Timur 2002 - 2013*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/jumlah-pendapatan-asli-daerah-pad-di-kota-batu-jawa-timur-2002-2013>
- <https://radarmalang.jawapos.com/>. (2022). *PAD Baru 75 Persen, Pajak Reklame Seret*. <https://Radarmalang.Jawapos.Com/>. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/06/10/2022/pad-baru-75-persen-pajak-reklame-seret/>
- Kodir, A. (2018). Tourism and development: Land acquisition, achievement of investment and cultural change (case study tourism industry development in Batu City, Indonesia). *Geojournal of Tourism and Geosites*, 21(2), 253–265. <https://doi.org/10.30892/gtg.21120-285>
- Ladgin, N. (2008). *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah ( Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah )*. *September*, 124.
- Marlisa, E. R., & Blesia, J. U. (2018). Fiscal dependence in a special autonomy region: evidence from a local government in eastern Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.574>
- Martinez-vazquez, J., Lago-peñas, S., & Sacchi, A. (2015). *The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey Jorge Martinez-Vazquez Santiago Lago-Peñas Agnese Sacchi*. *June*, 1–37. <http://aysps.gsu.edu/isp/index.html>
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytyaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. *Investment Management and Financial*

*Innovations*, 16(3), 29–39. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.04](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04)

- Salinan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur, 1965 1 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165225/perda-kota-surabaya-no-1-tahun-2021>
- Qiao, M., Ding, S., & Liu, Y. (2018). *Fiscal Decentralization and Government Size : The Role of International International Center for Center for Public Policy Public Policy International Center for Public Policy Fiscal Decentralization and Government Size : The Role of Democracy Mo Qiao*.
- Rahman, N. A., Naukoko, A., & Londah, A. (2014). Di Provinsi Sulawesi Utara ( Studi Pada Kota Manado Dan Kota Bitung. *Brkah Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 56–70.
- Setiawan, F., & Aritenang, A. F. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic performance in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 340(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/340/1/012021>
- Slavinskaite, N., Novotny, M., & Gedvilaite, D. (2020). Evaluation of the fiscal decentralization: Case studies of european union. *Engineering Economics*, 31(1), 84–92. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.1.23065>
- Tri Hardianto, W., Khairul Muluk, M., & Fefta Wijaya, A. (2017). Tourism Investment Services in Batu City With Penta Helix Perspective. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5(05), 17–22. [www.ijmas.org](http://www.ijmas.org)
- Vidya Imanuari Pertiwi, & Oktarizka Reviandani. (2022). Analisis Kesehatan Fiskal Daerah: Studi Pada Apbd Kabupaten Mojokerto 2018. *Journal Publicuho*, 5(3), 722–732. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16>
- Zaenurullah, L., & Suryawati, D. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu sebagai Daerah Otonom Baru The Economic Growth of Batu City as a New Autonomous Region. In *Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu sebagai Daerah Otonom Baru E-SOSPOL* (Vol. 2). [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)